

ABSTRAK

Wabah virus SARS-CoV-2 ditetapkan menjadi pandemi global. Pandemi COVID-19 menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah menjadi penentu penanganan persebaran COVID-19. Dan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan presiden yang menjadi kontroversi di masyarakat. Pada penelitian ini peneliti mengkaji komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada masa pra-krisis sampai masa krisis menghadapi Pandemi COVID-19 pada bulan Januari-Agustus 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Analisis komunikasi kebijakan publik dilakukan dengan mengembangkan kajian komunikasi kebijakan publik model analisis kebijakan integrative William N Dunn. Untuk analisis kajian politik dan pendekatan *Crisis and Emergency Risk* (CERC) Barbara Reynolds dan Matthew W Seeger.

Dengan metode penelitan studi kasus dan paradigma konstruktivis, hasil kajian dibagi menjadi tiga tahapan, tahap sebelum krisis seharusnya melibatkan publik untuk memberikan pengetahuan awal guna membantu publik agar memahami dan mempersiapkan diri menghadapi krisis. Kedua tahap awal krisis pemerintah harus memberikan informasi yang seragam untuk menghindari kesimpangsiuran berita. Terakhir tahap pada fase krisis, pemerintah harus menjelaskan tanggapan keadaan darurat, mengoreksi rumor dan misinformasi, serta rencana pemulihan pasca krisis.

Kata Kunci: Komunikasi, komunikasi politik, kebijakan publik, manajemen isu, komunikasi krisis.



ABSTRACT

The SARS-CoV-2 virus outbreak has been declared a global pandemic. The COVID-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia. Government policies are the determinants of handling the spread of COVID-19. And in handling Covid-19 in Indonesia, there are several presidential policies that have become controversial in the community. In this study, researchers examine public policy communications made by President Jokowi during the pre-crisis period until the crisis period facing the COVID-19 pandemic in January-August 2020.

This study aims to analyze President Jokowi's public policy communication in dealing with the Covid-19 pandemic. Analysis of public policy communication is carried out by developing a study of public policy communication with William N Dunn's integrative policy analysis model. For the analysis of political studies and the Crisis and Emergency Risk (CERC) approach, Barbara Reynolds and Matthew W Seeger.

With case study research methods and constructivist paradigms, the results of the study are divided into three stages, the pre-crisis stage should involve the public to provide initial knowledge to help the public understand and prepare for the crisis. The two early stages of the crisis the government must provide uniform information to avoid news confusion. The last stage in the crisis phase, the government needs to explain the emergency response, correct rumors and misinformation, and explain the post-crisis recovery plan.

Keywords: *Communication, Political Communication, Public Policy, Issue Management, Crisis Communication.*



UNIVERSITAS
MERCU BUANA